

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setelah sekian lama terpenjara dalam politik sentralisasi oleh pemerintah pusat, daerah-daerah di Indonesia menjadi bisu terhadap aspirasi masyarakat lokal. Daerah tidak diberikan kewenangan untuk melaksanakan kontestasi politik ditingkat lokal. Baru setelah Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah digulirkan dan diberikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan demokrasi lokal dengan cara memilih Gubernur, Bupati/Walikota secara langsung. Tahun 2005 untuk pertama kalinya dilaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) “sekarang Pemilukada” secara langsung di Indonesia. Pemilukada langsung ini merupakan amanat konstitusi dan tentu saja adalah bagian dari proses penguatan demokrasi lokal dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah.

Kajian mengenai Pemilukada secara langsung pada dasarnya merupakan pilar untuk memperkokoh bangunan demokrasi secara nasional. Sebagai mana dinyatakan oleh Tip O Neill, "*all politic is local*", yang berarti demokrasi akan berkembang subur dan terbangun kuat diatas nasional apabila tingkatan yang lebih rendah (Lokal) nilai-nilai demokrasi berakar kuat. Pemilukada secara langsung adalah perkembangan menarik dalam sejarah perpolitikan lokal di Negeri ini, karena pemilukada langsung merupakan momentum pelekatan dasar fondasi kedaulatan rakyat dan sistem politik serta demokrasi di aras lokalKota sebagai kesatuan jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan

penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen serta coraknya materialistik. Masyarakat kota terdiri atas penduduk asli daerah tersebut dan pendatang. Masyarakat kota merupakan suatu masyarakat yang heterogen, baik dalam hal mata pencaharian, agama, adat, dan kebudayaan

Pilkada yang akan dilaksanakan di daerah pun diharapkan akan membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan berpolitik di tingkat lokal, membawa nilai-nilai identitas lokal baik secara sosio-ekonomi, politik, serta budaya masyarakat. Undang-undang pilkada menghendaki terlaksananya pemilihan secara tertib berdasarkan peraturan yang ada, akan tetapi sering menjadi masalah yang muncul adalah para kandidat kurang mendukung, mengikuti proses secara baik berdasarkan peraturan yang telah dibuat, sehingga yang terjadi adalah ketimpangan, terkikisnya nilai-nilai demokrasi dengan agenda politik hitam yang dijalankan untuk memperjuangkan harga suara dalam pemilu nantinya, tanpa melihat serta mengedepankan nilai-nilai khas lokal yang dijunjung oleh warga masyarakat lokal.

Sebagai bentuk melaksanakan demokrasi politik lokal dalam pelaksanaan pilkada untuk memilih kepala daerah yang berkualitas, bermoral, tentunya ke depan diharapkan Kepala daerah benar-benar mengerti permasalahan masyarakat lokal dan mampu melaksanakan kebijakan yang bersentuhan dengan kepentingan warga Negara.

Tidak heran modal sosial yang ada dalam masyarakat lokal digunakan oleh politisi, elit lokal dalam memenuhi kepentingan pemilihan kepala daerah. Secara

logika maka modal sosial seperti, munculnya identitas, suku, agama, ras, budaya, dan lain-lain, yang tentunya merupakan elemen-elemen politik yang tidak bisa dihindari harus bersentuhan dengan persoalan politik. Politik identitas muncul akibat bagian dari elemen politik sebagai modal sosial dalam masyarakat lokal. Tetapi yang menjadi titik fokus ketika politik identitas turut dilibatkan proses pemilihan kepala daerah oleh elit lokal dijadikan tameng politik dengan muatan yang tidak logis, tetapi rasional bagi elit yang mempunyai kepentingan, memperjuangkan apa yang diinginkan.

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem Demokrasi. Negara yang berdasarkan demokrasi akan mendapatkan kedaulatan rakyat yang dilakukan melalui proses pemilihan umum. Dalam pelaksanaan demokrasi, Indonesia mengadakan pemilihan umum baik presiden, legislative, gubernur, walikota dan bupati serentak dalam lima tahun sekali. Dan semuanya telah diatur sedemikian rupa oleh komisi pemilihan umum (KPU)

Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia sekaligus menjadi kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota Surabaya juga merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di Jawa Timur serta wilayah Indonesia bagian timur. Kota ini terletak 796 km sebelah timur Jakarta, atau 415 km sebelah barat laut Denpasar, Bali. Surabaya terletak di tepi pantai utara Pulau

Jawa dan berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Surabaya memiliki luas sekitar 333,063 km² dengan penduduknya berjumlah 2.909.257 jiwa (2015).¹

Di akhir tahun 2015 merupakan suhu terpanas dalam perpolitikan di kota Surabaya, mengapa? Karena kota yang berlambangkan suro (ikan hiu) dan boyo (buaya) lagi mempunyai hajatan besar yaitu pemilihan Walikota surabaya tanggal 9 Desember 2015. Sebelumnya dalam pembukaan bakal calon walikota Surabaya yang dibuka oleh KPU Surabaya ada beberapa kandidat yang mendaftar untuk memperebutkan Surabaya 1 dan 2. Walikota sebelumnya Tri Risma Harini dan Whisnu Sakti Buana juga telah mendaftar untuk kembali memperebutkan kursi walikota dan wakil walikota Surabaya periode 2015-2020. Ada beberapa kandidat yang mendaftar diantaranya Dhiman Abror dan Rasiyo, pasangan ini tidak dapat mengikuti pilwali Kota Surabaya karena terganjal oleh berkas persyaratan tahap 2 di KPU Surabaya, kembali para koalisi majapahit mengeluarkan nama Rasio-Lusy sebagai tandingan walikota lama. Dalam pertarungan tersebut ada 2 kandidat yang harus memperebutkan hati rakyat kota Surabaya yang berjumlah 2 juta lebih DPT yaitu Dr. H. Rasiyo, M.Si – Dra. Lucy Kurniasari di urutan pertama yang di usung oleh Partai Amanan Nasional(PAN) dan Partai Demokrat serta koalisi Majapahit dan DR. (HC). Ir. Tri Rismaharini, M.T. – Whisnu Sakti Buana, ST di urutan kedua yang hanya diusung Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

¹Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya diakses pada Kamis 19 November 2015

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya dalam perpolitikan ada saja pihak-pihak yang berkepentingan dan selalu bermain di belakang panggung politik yang tujuannya adalah jabatan dan kekuasaan, hal ini tidak bisa dijauhkan dengan perubahan para elit politik partai penguasa yang memiliki kepentingan individual yang hanya ingin menguntungkan diri sendiri tanpa memikirkan kaum dibawahnya yaitu rakyat yang semakin hari semakin susah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Dinamika elit politik selalu menjadi hal menarik untuk dibahas, karena sifatnya selalu berubah sesuai kondisi zaman dan tidak terikat pada ruang dan waktu. Dimana kemudian persoalan elit politik ini akan selalu berkutar pada kepentingan dan kekuasaan semata. Dinamika dalam konteks politik adalah gerak atau kekuatan politik yang dimiliki dan dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan elite politik adalah individu atau kelompok yang secara kuantitas kecil, namun mempunyai akses dan power yang mana dalam hal ini biasanya menempati lapisan atas dalam lapisan masyarakat.

Kedudukan elit yang berada pada posisi sosial yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat lainnya, terdapat suatu logika sederhana yang bisa kita tarik mengapa kemudian mereka yang menanamkan dirinya elite tersebut. Bagi elit, kelebihan yang mereka miliki, sebagai mana dikemukakan oleh Keller, membuat elit menjadi magnet kekuasaan yang berpotensi untuk mampu melakukan segala hal.

Dalam konteks perpolitikan yang ada di dunia, elit yang kini banyak memilih untuk terjun kedalam ranah politik, seyogyanya bukanlah mereka yang paham akan ilmu-ilmu politik sebagaimana seharusnya dimiliki oleh seorang politisi guna mengelola tata Negara. Bahkan politik sendiri menjadi magnet yang memikat seluruh kalangan, meskipun mereka sebelumnya bukanlah termasuk sebagai kalangan elit.

Politik individu inilah dapat diasumsikan bahwa peran elit dalam hal pengambilan keputusan maupun kebijakan menjadi salah satu faktor paling penting bagaimana hal tersebut akan diambil dan berjalan. Budaya seperti inilah yang kemudian merembet pada kalangan elit yang berda pada kasta terbawah. Bukan karena ketokohan elit tersebut yang menjadi penentu kenapa kemudian politik elit tersebut berjalan, namun lebih dikarenakan keyakinan elit daerah bahwa mereka telah melakukan banyak hal, termasuk pengorbanan financial untuk mencapai posisi yang menjadikan dirinya sebagai pemegang kekuasaan di daerah. Disini dapat dilihat bahwa kemudian elit politik yang menjadi bidak penentu dalam hal bagaimana kemudian sebuah partai politik memainkan peran mereka dalam peraturan politik.

Peneliti ingin mengambil judul “DINAMIKA ELIT POLITIK PARTAI DEMOKRAT” (Studi Kasus Pencalonan Rasio-Lucy Dalam Pemilihan Walikota Surabaya 2015) karena didalam partai demokrat ini banyak elit politik yang menggunakan jabatan sebagai kekuasaan demi kepentingan masing-masing elit partai.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dinamika elit politik partai demokrat dalam pencalonan Rasio-Lucy sebagai calon walikota Surabaya 2015 ?
 2. Siapa saja Aktor/Elit yang berkepentingan dan apa saja motif yang dilakukan oleh aktor/elit dalam pencalonan Rasio-Lucy sebagai calon walikota Surabaya 2015?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui dinamika elit politik partai demokrat dalam pencalonan Rasio-Lucy sebagai walikota Surabaya 2015
 2. Mengetahui siapa saja Aktor/Elit yang berkepentingan dan motif para aktor/elit dalam pencalonan Rasio-Lucy sebagai walikota Surabaya 2015

1.4. Manfaat Penelitian

1. Dalam manfaat teoritis, penelitian ini merupakan kegiatan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam wacana Dinamika Elit Politik Partai Demokrat.
 2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memperbanyak bacaan mengenai dan wawasan mengenai Dinamika elit politik partai Demokrat.

3. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang seperti : partai politik, mahasiswa, dan pemerintah. Manfaat lain riset ini bagi masyarakat adalah memberikan landasan berpikir dalam hal pentingnya pemahaman dinamika elite politik suatu partai.

1.5. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami judul dalam karya ilmiah ini dan untuk memperjelas interpretasi/pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap pokok bahasan proposal yang berjudul “DINAMIKA ELIT POLITIK PARTAI DEMOKRAT” (Studi Kasus Pencalonan Rasio-Lucy Dalam Pemilihan Walikota Surabaya 2015 ”).maka akan dijelaskan istilah-istilah yang terangkai pada judul dan konteks kebahasaannya.

Dinamika :. Gerak atau kekuatan politik yang dimiliki dan dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan.²

Elite politik : individu atau kelompok yang secara kuantitas kecil, namun mempunyai akses dan power yang mana dalam hal ini biasanya menempati lapisan atas dalam lapisan masyarakat.³

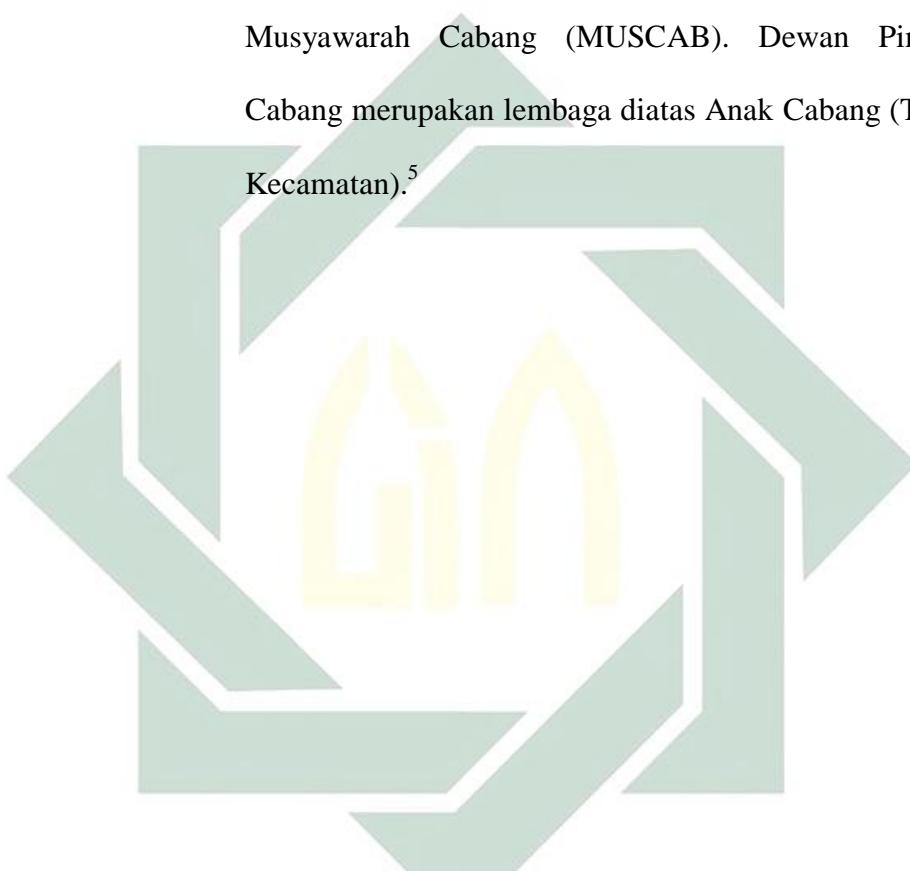
² Kamus Besar Bahasa Indonesia

³ Dikutip dari <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-14.20R.%20Bintang%20Permana.pdf> diakses pada kamis 19 november 2015 19.35

Partai Demokrat : Sebuah partai politik di Indonesia. Partai ini didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003⁴.

DPC Partai Demokrat : lembaga (Organisasi) yang memiliki wewenang tertinggi di tingkat Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang (MUSCAB). Dewan Pimpinan Cabang merupakan lembaga diatas Anak Cabang (Tingkat

Kecamatan).⁵



⁴ Arsip partai demokrat

5 idem

1.6. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian dan penyajian yang telah ada, ditemukan karya ilmiah baik berupa skripsi, thesis, dan buku yang sealur dengan tema kajian penelitian ini. Berikut hasil usaha penelusuran tentang karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian ini:

1. Bintang Permana Putra, *Dinamika Elite Dalam Politik Surabaya (Study konflik pemakzulan Walikota Surabaya)* 2012. Jurnal. Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga Surabaya

Hasil : Dinamika elite dalam suatu masyarakat berjalan dan kemudian terjadi sebuah wacana pemakzulan seorang elite yang ada dalam daerah tersebut. Dalam kasus wacana pemakzulan walikota Surabaya, Tri Risma, dinamika elite tarik menarik kepentingan guna melengserkan walikota perempuan pertama di Surabaya ini. Hadirnya kepentingan elite tak hanya berasal dari kalangan politisi semata, namun juga atas desakan dari elite pengusaha yang merasa dirugikan oleh kebijakan-kebijakan Tri Risma mengingat tak sedikit politisi yang menggugat Tri Risma, yakni sebagian besar kalangan DPRD Kota Surabaya merupakan elite pengusaha di sisi lain serta terdapat pula politisi yang memiliki hubungan erat dengan elite pengusaha. Dalam perjalannya wacana pemakzulan Tri Risma ini memiliki dinamika yang sangat menarik setelah dikaji lebih dalam. Dinamika pemakzulan yang bermula dari salah satu kebijakan risma yang dirasa kurang menguntungkan bagi sebagian pihak ini, yakni kebijakan pajak reklame sebagai salah satu contoh, menjadi awal dari kebijakan para politisi DPRD Surabaya yang kemudian bertransformasi menjadi Surat Keputusan DPRD Kota Surabaya No. 02

tahun 2011 tentang pemberhentian Walikota Surabaya yang kemudian dikirimkan kepada Mahkamah Agung. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Tipe penelitian deskriptif ini mencoba menggambarkan fenomena yang terjadi. Dalam hal ini, peneliti mencoba memberikan gambaran sejelas mungkin mengenai bagaimana dinamika kepentingan elite politik, baik itu dalam hal kepentingan-kepentingan yang ada, proses muncul dan berjalannya negosiasi politik antar elite, serta aktor-aktor yang berperan dalam wacana pemakzulan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini.

2. Noviano Suyide, *Rekrutmen Politik Kepala Daerah Kota Surabaya 2010 (Studi Dinamika Rekrutmen Politik Calon Walikota Surabaya di Internal DPC PDI-Perjuangan)* 2013. Skripsi. Program Studi Politik Islam, Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya

Hasil: Rekrutmen Kepala Daerah Kota Surabaya pada tahun 2010 di internal DPC PDI Perjuangan. Dalam penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua persoalan utamanya yaitu: Pertama, bagaimana mekanisme rekrutmen calon Kepala Daerah di internal DPC PDI-Perjuangan ? Kedua, bagaimana proses implementasi rekrutmen calon Kepala Daerah Kota Surabaya periode 2010-2015 oleh PDI-Perjuangan ? Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan proses rekrutmen calon walikota Surabaya di internal DPC PDI Perjuangan . Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Tipe penelitian deskriptif ini mencoba menggambarkan fenomena yang terjadi. Dalam hal ini, peneliti mencoba

memberikan gambaran sejelas mungkin mengenai bagaimana dinamika kepentingan elite politik, baik itu dalam hal kepentingan-kepentingan yang ada, proses muncul dan berjalannya negosiasi politik antar elite, serta aktor-aktor yang berperan dalam proses rekrutmen calon walikota Surabaya di internal PDI Perjuangan. Dari rumusan masalah diatas, kesimpulan yang diemukakan dalam penelitian ini adalah: Pertama, adanya oligarki partai yang membuat perbedaan nama bakal calon dan calon kepala daerah dalam hierarki struktural partai. Kedua, PDIP mengambil langkah yang tepat dengan menggunakan survei sebagai salah satu landasan ilmiah dalam penetapan calon kepala daerah yang diusungnya dalam Pilwali Surabaya 2010, walaupun dengan dinamika partai sebagai konsekuensi demokrasi.